IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI PENGADILAN AGAMA WONOGIRI KELAS 1B

Oleh: M. Saifuddin, S.H.I.
Hakim Pengadilan Agama Wonogiri

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki.¹ Dewasa ini, aktivitas bisnis berkembang begitu pesat dan merambah berbagai macam kehidupan, baik menyangkut barang maupun jasa. Perkembangan aktivitas bisnis tersebut juga diikuti oleh hukum bisnis, baik secara teori maupun praktik yang semakin berkembang pula. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang ekonomi yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai bentuk kerja sama bisnis yang dalam perkembangannya dijalankan dengan berbagai sistem, salah satunya adalah praktik ekonomi berdasarkan prinsip agama, seperti ekonomi syariah atau ekonomi islam.²

Sebagai konsekuensi dari perkembangan ekonomi syariah yang begitu signifikan, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute*) di antara para pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi syariah. Menurut Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Dr. H. M. Syaifuddin, S.H., M.H., sebagaimana dikutip Yusna Zaidah, terjadinya sengketa perbankan syariah dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, diantaranya karena konflik data yang disebabkan oleh *lack of information* dan *mis-information* terutama karena adanya *conflict of interest* (konflik kepentingan) dan *conflict of*

¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik hukum Persepektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, h.421

² Istilah ekonomi syariah merupakan nomenklatur yang khas digunakan di Indonesia, istilah ekonomi syariah populer dengan sebutan ekonomi Islam sebagai terjemahan dari istilah Islamic economic dan al-iqtisad al-Islami. Nomenklatur "ekonomi syariah" ini sejalan dengan pendekatan yuridis formal yang menggunakan istilah "perbankan syariah dan hasil introdusir dari Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang RI No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lihat : Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Edisi Revisi), (Jakarta: Gramata Publishing, 2010)h.80.

relationship (konflik hubungan) di antara para pihak.³

Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, dalam sengketa bisnis termasuk dalam sengketa ekonomi syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement option*) yang dikehendaki, baik melalui proses litigasi atau sistem peradilan (*ordinary court*) maupun proses non litigasi di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun perkara ekonomi syariah tergolong baru dalam lingkup peradilan agama, namun perkara yang masuk menunjukkan angka yang cukup signifikan. Berikut ini data perbandingan penanganan sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana dan gugatan biasa dalam rentang tahun 2019 sampai dengan 2021.

tabel perkara sengketa ekonomi syariah di indonesia

No.	Tahun	Gugatan Sederhana		Gugatan Biasa	
		Terima	Putus	Terima	Putus
1	2019	168	38	221	164
2	2020	265	184	198	61
3	2021	162	99	325	217

Berikut ini adalah data perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Wonogiri.

tabel perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama wonogiri

No.	Tahun	Gugatan Sederhana		Gugatan Biasa	
		Terima	Putus	Terima	Putus
1	2019	0	0	0	0
2	2020	0	0	1	1
3	2021	18	18	0	0

³ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Cet. Ke-1; Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2011), h. 6.

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat jelas bahwa jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang diadili oleh pengadilan agama melalui gugatan sederhana mengalami peningkatan dibandingkan jumlah perkara ekonomi syariah melalui gugatan biasa. Hal ini sejalan dengan karakteristik perbankan syariah di Indonesia yang termasuk kategori retail banking, sehingga jenis sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama didominasi oleh sengketa yang termasuk kategori gugatan sederhana. Disamping itu, data tersebut di atas, juga menunjukkan trust/kepercayaan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketanya di Peradilan Agama juga semakin meningkat.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan di atas, penulis ingin merumuskan 3 (tiga) permasalahan yaitu:

1. Bagaimana definisi dari Gugatan Sederhana?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama serta landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya perkara Gugatan Sederhana?
3. Bagaimana implementasi penyelesaian perkara Gugatan sederhana di Pengadilan Agama Wonogiri?

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana adalah sengketa perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak RP.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Viide Pasal 1 dan Pasal 3) Kriteria Gugatan Sederhana sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019.

1. Nilai Gugatan

- Nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah)

2. Jenis Perkara Ingkar janji (wanprestasi) atau Perbuatan melawan hukum (PMH) dengan kriteria:
 - Bukan merupakan sengketa hak atas tanah;
 - Bukan perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.
3. Para Pihak, para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu. Penggugat dan Tergugat boleh lebih dari satu apabila memiliki kepentingan yang sama;
4. Batas domisili
 - Penggugat dapat berada di luar wilayah Tenggugat;
 - Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal wilayah atau domisili Tergugat, Penggugat dapat mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dan didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat (vide Pasal 4 ayat (3a))
5. Prosedur elektronik
 - Menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai peraturan per-UU-an (vide Pasal 6A).
 - Include E-Filling, E-Payment, ESummons, dan E-Litigation (vide Perma Nomor 1 Tahun 2019)

Beberapa hal penting dalam Gugatan Sederhana:

1. Pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan
2. Pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara,
3. Penunjukan hakim paling lama 2 hari dan panitera sidang, pemeriksaan hakim tunggal
4. Ada pemeriksaan pendahuluan
5. Mediasi tidak ada
6. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun punya kuasa hukum

7. Konsekwensi ketidakhadiran Penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah gugatan bisa dinyatakan gugur.
8. Pemeriksaan perkara hanya gugatan dan jawaban
9. Batas waktu penyelesaian 25 hari sejak sidang pertama
10. Penyampaian putusan paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan
11. Upaya keberatan paling lambat 7 hari
12. Kewenangan pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali tidak ada.

2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah

Landasan Hukum Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
2. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En

Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);

4. Het Herzeine Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
5. Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Perubahannya);
6. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
7. Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989);
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (khusus perkara ekonomi syariah dalam lingkup perbankan syariah)
13. Putusan MK Nomor 093/PUU-X/2012 menegaskan penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan wewenang Pengadilan Agama.
14. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait (Sema Nomor 6 Tahun 2014; Perma Nomor 5 Tahun 2016; Perma Nomor 1 Tahun 2016, SE Dirjen Badilag No.1 Tahun 2017, dll)

3. Implementasi penyelesaian perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Wonogiri;

Setelah dilantik menjadi hakim di Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B tanggal 09 Desember 2022, Penulis melihat wujud dari implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Agama Wonogiri yaitu dilihat dari sebuah sistem hukum. Dalam Substansi hukum diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang disesuaikan dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian

Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam membangun proses hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri dapat di selesaikan melalui gugatan sederhana (Small Claim Court), terbukti sudah di implementasikan, pada tahun 2021 perkara gugatan sederhana yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Wonogiri sejumlah 18 perkara, dan bahkan telah mendapatkan Penganugerahan dari Mahkamah Agung RI sebagai Terbaik ke II Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Agama dengan beban perkara 1001-2500;

Berikut ini adalah bentuk implementasi dari pelaksanaan gugatan sederhana di pengadilan Agama Wonogiri:

1. Pendaftaran

Calon Penggugat mengambil Nomor antrian kemudian menghadap ke bagian pelayanan informasi. Calon Penggugat dapat meminta kepada petugas pelayanan informasi untuk meminta penjelasan mengenai prosedur, syarat-syarat yang diperlukan, dan waktu penyelesaian perkara dari pendaftaran sampai putusan serta biaya yang harus disiapkan;

Prosedur pendaftaran perkara di pengadilan Agama Wonogiri meliputi :

1. Pengisian formolir gugatan sederhana di petugas pendaftaran PTSP
2. Membayar panjar biaya pendaftaran perkara melalui bank yang ditunjuk Pengadilan Agama Wonogiri.
3. Memberikan bukti transfer panjar biaya perkara kepada petugas dan surat gugatan rangkap 5 ke petugas pendaftaran
4. Melampirkan foto copy bukti-bukti surat yang telah dileges di Kantor Pos.

Pada tahap pendaftaran perkara untuk memastikan surat gugatan sederhana sudah lengkap atau belum, petugas pendaftaran di PTSP harus memeriksa/mengecek dengan rincian yaitu:

1. Surat gugatan rangkap 5
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
3. Foto copy akad syariah yang nominalnya tidak lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4. Foto copy bukti-bukti surat yang telah dileges

Jika semuanya sudah lengkap petugas pendaftaran membawa kepanitera untuk di verifikasi

2. Panitera memeriksa kelengkapan berkas gugatan sederhana

Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4.

Maksud Pasal 3 yaitu:

- a. Gugatan sederhana yang diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materil paling banyak Rp.500.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- b. Tidak termasuk gugatan sederhana adalah:
 - Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - Sengketa hak atas tanah.

Maksud pasal 4 yaitu:

- a. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama.
- b. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- c. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
- d. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri membuat Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa gugatan sederhana, kemudian panitera menunjuk panitera pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Dari ketiga proses diatas dapat dilaksanakan paling lambat dua hari.

4. Pemeriksaan pendahuluan gugatan sederhana

Pada pemeriksaan pendahuluan, Hakim Tunggal berkewajiban untuk memeriksa dan menilai sederhana atau tidaknya gugatan tersebut dengan

mencermati posita dan petitum gugatan.

- a. Posita adalah penjelasan/uraian dari suatu tuntutan/alasan-alasan yang biasa disebut “pokok perkara” yang harus diuraikan secara jelas dan runtut objek sengketa dan memenuhi 2 unsur dasar hukum dan dasar fakta.
- b. Petitum adalah sesuatu yang diminta oleh Penggugat/kesimpulan gugatan yang berisi rincian apa yang diminta dan yang diinginkan Penggugat kepada hakim agar perkaranya dikabulkan.

5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak

Jika Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan yang diajukan itu gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang. Kemudian memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak.

Bahwa pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (5) yaitu:

1. Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
2. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
3. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek.
 - 3.a. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
4. Dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir.
5. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4) Tergugat dapat mengajukan keberatan.

6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, upaya perdamaian dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam

ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapainya perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Akta perdamaian bentuknya seperti blanko yang terdiri dari:

- a. Hari dan tanggal perdamaian yang dilakukan.
- b. Identitas para pihak
- c. Kesepakatan yang dicapai
- d. Tanda tangan para pihak yang berdamai
- e. Sesuai kehendak para pihak
- f. Tidak bertentangan dengan hukum
- g. Tidak merugikan pihak ketiga
- h. Dapat dieksekusi, dan
- i. Dengan itikad baik

7. Pembuktian Pembuktian dinilai tidak sederhana jika:

- a. Akadnya merupakan akad kombinasi atau akad murakkabah
- b. Memerlukan penjelasan dari ahli ekonomi syariah
- c. Melibatkan pihak ke ketiga, misalnya kantor lelang negara

8. Berita Acara Sidang dan Putusan

Setelah adanya proses pembuktian dan telah selesai, maka hakim membuat putusan. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan pembuktian atau pada persidangan berikutnya. Pada saat hakim mengucapkan putusan, disarankan untuk menyimak dan mencatat isi putusan. Kemudian setelah beberapa hari putusan dibacakan.

9. Upaya Hukum Putusan Gugatan Sederhana

Upaya Hukum gugatan sederhana adalah Keberatan dan keberatan merupakan upaya hukum terakhir/bersifat final artinya tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Terkait jangka waktu. Sedangkan penyelesaian gugatan sederhana berlangsung paling lama 25 hari sejak hari pertama. Dengan jangka waktu yang begitu singkat, Perma melarang para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi,

rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Tahap-tahapannya adalah pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukan panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang, perdamaian, pembuktian, dan putusan.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi dari Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Wonogiri berjalan dengan baik, dapat dilihat dari sistem hukumnya maupun dari seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri baik dari Ketua, Wakil Ketua hakim, panitera, jurusita, Petugas PTSP. Salah satu bentuk Implementasi dari gugatan sederhana yaitu Hakim yang menangani perkara ini adalah Hakim tunggal, dengan waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak hari sidang pertama ditentukan, Nilai gugatan paling banyak Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah), tidak ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.
2. Efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama ditemukan berjalan dengan efektif, dilihat dari data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), menunjukkan waktu penyelesaian perkara hanya 25 hari sejak sidang pertama di tetapkan. Sehingga tidak memakan waktu yang panjang dan tentunya menghemat biaya perkara.

b. Saran

Adapun saran dari penulis setelah melakukan penelitian mengenai penerapan sistem gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Agama Wonogiri yaitu sebagai berikut:

Implementasi gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Perma maupun Sema. tentunya untuk mengimplementasikan dengan semaksimal mungkin memerlukan suatu kerja

keras dari seluruh pegawai yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri. Baik dari Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Petugas PTSP, dan diharapkan Hakim pengadilan Agama Wonogiri sedapat mungkin mengembangkan diri dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk menambah wawasan tentang ekonomi syariah agar lebih berkompeten dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonogiri;

E. DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., MM., *Politik hukum Persepektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group,
Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., MM., *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group,
Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Edisi Revisi), (Jakarta: Gramata Publishing;
Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Cet. Ke-1; Yogyakarta: Pustaka Prisma;